

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjelaskan perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor Perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

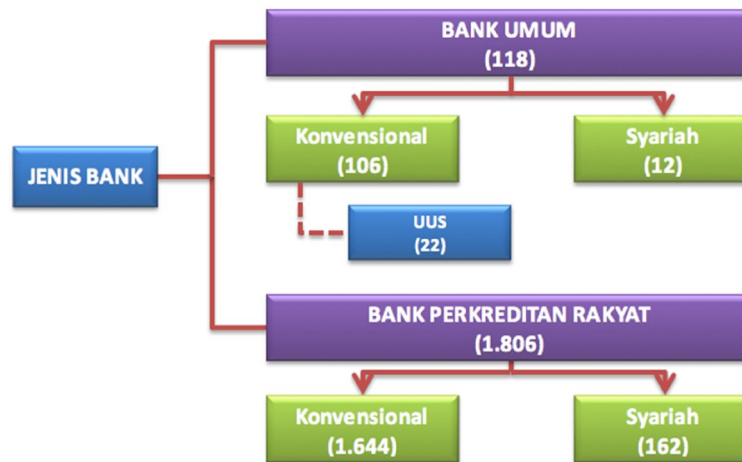
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia (2014:117), struktur industri keuangan Indonesia pada tahun 2014 masih didominasi oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (BU) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hal ini terlihat dari rasio total aset industri perbankan terhadap lembaga keuangan yang tercatat sebesar 78,6%.¹ Meskipun jumlah BU turun dari 120 bank menjadi 119 bank, dan angka jumlah BPR naik dari 1.635 menjadi 1.643, jumlah aset tumbuh 13,4% dari Rp4.954,5 triliun menjadi Rp5.615,1 triliun. Peningkatan total aset didukung dengan perluasan jaringan usaha bank, terlihat dari jumlah kantor BU dan BPR yang meningkat masing – masing dari 18.558 dan 4.678 pada tahun 2013 menjadi

19.948 dan 4.895 kantor. Dari total BU, jumlah bank syariah sebanyak 12 bank, dengan 2.175 kantor, meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 11 bank dengan 1.987 kantor. Sedangkan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) menurun dari 23 menjadi 22 UUS.2 Bank umum di luar bank syariah merupakan Bank Umum Konvensional (BUK).

Pada semester I 2015 menurut Bank Indonesia (2015:75), ketahanan industri perbankan konvensional dan syariah masih terjaga dengan baik sebagaimana terlihat dari level permodalan yang relatif tinggi meski mendapat tekanan yang bersumber dari melambatnya perekonomian domestik, melemahnya nilai tukar Rupiah, tertundanya realisasi anggaran Pemerintah dan perilaku prosiklikalitas perbankan. Total aset industri perbankan mengalami peningkatan dari Rp5.615,1 triliun menjadi Rp5.933,2 triliun, atau meningkat sebesar 14,1% sedikit lebih tinggi dibanding semester II 2014 sebesar 13,3%.

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas bank umum dan BPR. Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah tidak dapat menerima simpanan berupa giro dan tidak dapat turut serta dalam lalu lintas pembayaran, tidak dapat melakukan kegiatan bisnis dalam valas dan jangkauan kegiatan operasional yang terbatas (www.ojk.go.id).



Gambar 1.1

Rekapitulasi Institusi Perbankan di Indonesia September 2015

Sumber: www.ojk.go.id.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan objek perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Permasalahan di dalam perusahaan perbankan seperti tidak ada habisnya, khususnya permasalahan kredit macet dan rekayasa laporan keuangan yang sering dijumpai di perbankan. Salah satu kasus perusahaan perbankan yang merekayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh eksekutif BTN dengan auditor internal bahkan auditor eksternal seperti *Ernts & Young* pada tahun 2010. Hal ini menarik untuk dikaji, karena kasus yang dilakukan BTN melibatkan auditor eksternal yang seharusnya bersikap independen. Untuk menjaga independensi auditor, maka pemerintah membuat peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor (*auditor switching*).

1.2. Latar Belakang Penelitian

Keberadaan perusahaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan khalayak banyak. Untuk menggerakkan roda organisasinya, perusahaan membutuhkan suntikan sumber daya modal. Sumber daya tersebut dapat diperoleh dari pemilik berupa setoran modal maupun pinjaman dari kreditur. Di dalam melaksanakan operasionalnya banyak pihak yang terlibat di dalamnya terutama *principal* yaitu pemilik modal/investor dan *agent* yang mewakilkan investor untuk

menjalankan perusahaan. Sebagai pihak yang diberikan kepercayaan, manajemen harus menyampaikan pertanggungjawabannya dengan menyajikan sebuah laporan yang dikenal sebagai laporan keuangan (Gunady dan Mangoting, 2013).

Berdasarkan PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan (2013), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Sedangkan tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan, karena dapat memberikan informasi yang berguna bagi penggunaannya dalam dunia bisnis untuk pengambilan keputusan yang tepat. Laporan keuangan disajikan kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan seperti manajemen, *stakeholders*, pemerintah, kreditur, investor, dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan.

Secara ringkas, kepentingan berbagai pihak tersebut di atas dalam Gunady dan Mangoting (2013) adalah sebagai berikut : bagi manajemen, laporan keuangan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan perusahaan, bagi *stakeholders*, laporan keuangan dapat digunakan sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan manajemen dalam mengelola modal yang ditanamkan untuk memperoleh laba, bagi pemerintah, terutama kantor pajak, laporan keuangan dapat digunakan sebagai patokan untuk menghitung jumlah pajak terhutang perusahaan, bagi kreditur, laporan keuangan menginformasikan kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek maupun jangka panjang, beserta dengan beban bunga yang harus ditanggung, bagi investor, laporan keuangan dijadikan sebagai instrumen yang utama dalam pertimbangan pengambilan keputusan untuk menanamkan modal dalam sebuah perusahaan.

Untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan, laporan keuangan harus diaudit oleh seorang auditor. Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor harus objektif dan independen. Independensi seorang auditor bisa terancam jika terjadi

hubungan kerjasama yang lama antara auditor dengan klien. Sehingga, untuk mencegah hilangnya independensi auditor tersebut pemerintah mengatur kewajiban rotasi auditor. Salah satu hal yang melatarbelakangi pemerintah mengatur kewajiban rotasi auditor adalah karena adanya kasus KAP Arthur Andersen dengan kliennya Enron (Aprillia, 2013).

Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan *outsourcing* secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Mantan *Chief Audit Executif* Enron (Kepala internal audit) semula adalah partner KAP Arthur Andersen (yang saat itu tergabung dalam *The Big Five* Kantor Akuntan Publik) yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan, direktur keuangan Enron berasal dari KAP Andersen, dan sebagian besar staf akunting Enron berasal dari KAP Andersen. Dalam kasus Enron diketahui terjadinya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan \$600 juta padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Pada tahun 2000, KAP Andersen mendapatkan *fee* audit dari Enron mencapai \$50 juta, sehingga Enron dapat dengan mudah melakukan pendekatan. Setelah pendapatannya di *mark up*, utangnya senilai \$1,2 miliar disembunyikan dengan teknik *off-balance sheet*. KAP Andersen dipersalahkan karena ikut membantu proses rekayasa keuangan tingkat tinggi itu. Skandal besar tersebut melahirkan *The Sarbanes-Oxley Act* (SOX) tahun 2002 untuk memperbaiki struktur pengawasan terhadap Kantor Akuntan Publik dengan menerapkan *auditor switching* secara wajib bagi perusahaan-perusahaan di Amerika.

Adapun kasus di Indonesia yang serupa dengan kasus Enron yaitu rekayasa laporan keuangan BTN. Dijelaskan pada laman kompasiana.com, masalah berawal dari *bookbuilding* (pengumpulan minat) *go public* BTN, yang menunjukkan kondisi *oversubscribe* hingga dua kali lipat yang menyebabkan penawaran harga saham BTN saat IPO pada kondisi *undervalued* yaitu nilai intrinsik per lembar saham BTN adalah sebesar Rp1.092, dengan harga penawaran pada saat IPO sebesar Rp.800. Eksekutif-eksekutif BTN telah

berkolusi dengan auditor internal bahkan auditor eksternal seperti *Ernts and Young* dalam kurun waktu yang lama untuk merekayasa laporan keuangan BTN.

Penulis mendapatkan informasi dari website BTN (www.btn.co.id) bahwa *Ernst and Young* sudah mengaudit laporan keuangan BTN sejak tahun 2003 hingga 2015, yang berarti sudah 13 tahun lamanya auditor BTN tidak diganti. Walaupun KAP tersebut sudah berganti nama beberapa kali dari KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, berganti menjadi KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, lalu menjadi KAP Purwantono, Suherman & Surja, dan pada tahun 2015 berganti menjadi KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, KAP-KAP tersebut adalah KAP yang berafiliasi dengan *Ernst and Young*.

Untuk mendongkrak harga saham, eksekutif BTN dengan auditor merencanakan program-program serta pencitraan yang dilakukan di media. Sejak adanya pencitraan di berbagai media, BTN mendapatkan banyak penghargaan dan membuat kondisi BTN yang sesungguhnya tidak dapat diketahui oleh investor ritel yang memperoleh informasi sangat terbatas. Seiring berjalannya waktu, auditor sudah tidak bias lagi menahan rekayasa tersebut. Akhirnya semua terungkapnya dengan adanya skandal rekayasa laporan kredit macet (*Non Performing Loan* atau NPL) BTN dari tahun 2011 sebesar Rp.3,46 % dan tahun 2012 sebesar 2,23 % tetapi pada bulan Agustus 2013 melonjak menjadi 5,21 %. Sejak ditemukannya rekayasa NPL, harga saham BTN anjlok ke angka Rp.900 dan tidak dapat bangkit kembali.

Dalam kasus ini, Bank Indonesia mencatat bahwa BTN merekayasa laporan keuangan yang tidak menunjukkan nilai NPL yang sebenarnya dengan tujuan memperbesar bonus yang akan diterima Direksi dan eksekutif serta dalam mempersiapkan laporan keuangan menjelang IPO dan *right issue*. Jika nilai NPL pada saat IPO tinggi, maka investor akan berpikir kembali untuk membeli saham BTN. Karena semakin tinggi rasio NPL maka tingkat likuiditas bank terhadap dana pihak ketiga akan semakin rendah. Selain itu, meningkatnya NPL ini jika dibiarkan secara terus-menerus akan memberikan pengaruh negatif pada bank, salah satu dampak negatifnya yaitu mengurangi jumlah modal yang dimiliki oleh bank.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa KAP-KAP tersebut telah melanggar etika profesi dan independensi seorang auditor eksternal masih patut untuk dipertanyakan. Nasser *et al.* (2006) dalam Astrini dan Muid (2013) berpendapat bahwa independensi seorang auditor akan hilang apabila auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien, karena hal ini dapat mempengaruhi sikap mental dan opini mereka ketika melakukan pekerjaan. Salah satu ancamannya adalah *audit tenure* yang panjang. *Audit tenure* yang panjang dapat menyebabkan auditor untuk mengembangkan “hubungan nyaman” serta kesetiaan yang kuat atau hubungan emosional dengan klien mereka yang dapat mencapai tahap dimana independensi auditor terancam.

Untuk mencegah adanya pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan kepada auditor eksternal, maka pemerintah Indonesia mengatur adanya pergantian auditor dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang merupakan penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 dan No. 359/KMK.06/2003 yang dianggap sudah tidak memadai. Beberapa perubahan yang terjadi diantaranya dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 Pasal 6 ayat (4) berisi pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sedangkan perubahan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 Pasal 3 ayat (1) berisi pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Dwiyanti dan Sabeni (2014) menjelaskan *auditor switching* dapat terjadi secara *mandatory* maupun *voluntary*. *Auditor switching* secara *mandatory* dilakukan hanya berdasarkan peraturan yang berlaku, yang membatasi *audit tenure* dengan tujuan untuk menjaga independensi auditor. Sedangkan *auditor switching* yang dilakukan secara *voluntary* merupakan keputusan yang hanya

berdasar keinginan dari perusahaan itu sendiri, diluar peraturan yang ada. *Auditor switching* secara *voluntary* ini dapat dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor.

Menurut Juliantari dan Rasmini (2013) *auditor switching* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan klien. Damayanti dan Sudarma (2007) dalam Divianto (2011) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan berpindah Kantor Akuntan Publik dan dari penelitian yang dilakukan memberikan hasil bahwa variabel *fee* audit dan ukuran KAP yang mempunyai pengaruh terhadap perusahaan publik di Indonesia berpindah KAP. Variabel lain, yaitu pergantian manajemen, opini akuntan, kesulitan keuangan perusahaan, dan persentase perubahan ROA tidak memiliki pengaruh terhadap perusahaan publik di Indonesia berpindah KAP.

Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau direksi berhenti karena kemauan sendiri (Damayanti, 2008 dalam Juliantari, 2013). Dengan adanya pergantian manajemen, maka kebijakan – kebijakan yang ada sebelumnya di perusahaan akan berubah mengikuti kebijakan yang dibuat oleh manajemen baru, salah satu akibatnya yaitu *auditor switching*. Beberapa penelitian menunjukkan pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Dalam penelitian Aprillia (2013), Juliantari dan Rasmini (2013) menunjukkan pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* dan hasil penelitian Astrini dan Muid (2013) pergantian manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Sabeni (2014) menunjukkan bahwa perubahan manajemen berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Hal ini didukung oleh penelitian Chadegani *et al.* (2011) dalam hasil penelitiannya, perubahan manajemen ditemukan sebagai faktor penting yang menyebabkan *auditor switching*.

Financial distress merupakan kondisi perusahaan yang sedang dalam masa kesulitan keuangan (Aprilia,2013). Ketidakpastian bisnis pada perusahaan-perusahaan yang mengalami *financial distress* (kesulitan keuangan)

menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah KAP (Schwartz dan Soo, 1995 dalam Wijayani dan Januarti, 2011). Dengan demikian, saat perusahaan dalam keadaan kesulitan keuangan, mereka cenderung akan mengganti auditor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Sabeni (2014) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gunady dan Mangoting (2013), variabel *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik, dimana semakin tinggi tingkat *financial distress* suatu entitas, maka kecenderungan untuk melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik semakin tinggi. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Pratitis (2012), Astrini dan Muid (2013), dan Aprillia (2013) menunjukkan bahwa variabel *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Ukuran KAP merupakan besar kecilnya KAP yang dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu KAP besar (KAP yang berafiliasi dengan *Big Four*) dan KAP kecil (KAP yang tidak berafiliasi dengan *Big Four*) (Aprillia, 2013). KAP yang besar biasanya memiliki reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis, sehingga mereka akan selalu berusaha mempertahankan independensi (Wijayani dan Januarti, 2011). Dengan demikian, perusahaan yang sudah menggunakan KAP besar akan kecil kemungkinannya untuk mengganti auditor. Dalam penelitian Pratitis (2012) dan Juliantari dan Rasmini (2013) menyatakan ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching* dan dalam penelitian Gunady dan Mangoting (2013) variabel reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik. Didukung oleh penelitian Aprillia (2013) yang menyatakan hanya variabel ukuran KAP saja yang secara parsial berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Astrini dan Muid (2013) dengan variabel reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Di Indonesia sendiri fenomena *auditor switching* masih terbilang tinggi dan karena hal ini lah yang menarik untuk dikaji kembali oleh peneliti, karena banyak faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *auditor switching*. Dilihat dari

penelitian-penelitian sebelumnya, hasilnya selalu berbeda-beda dan hal ini yang membuat penelitian tentang *auditor switching* semakin menarik.

Penelitian ini mengadopsi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aprillia (2013) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Auditor Switching*”. Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, pada objek penelitian yang dilakukan oleh Aprilia yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2008-2011 dengan melihat data tahun 2004-2007 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan objek perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. Pada variabel independen, ada beberapa variabel yang diuji ulang yaitu pergantian manajemen, *financial distress*, dan ukuran KAP. Sedangkan untuk variabel kepemilikan publik tidak diuji, karena masih jarang peneliti yang menggunakan variabel tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pergantian Manajemen, *Financial Distress*, dan Ukuran KAP terhadap *Auditor Switching* (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014)”**.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh pergantian manajemen, *financial distress*, dan ukuran KAP terhadap *auditor switching*.

1.4. Pertanyaan Penelitian

Di Indonesia, permasalahan *auditor switching* masih terbilang tinggi. Pemerintah telah membuat peraturan untuk pembatasan pemberian jasa audit pada Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang merupakan penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 dan No. 359/KMK.06/2003 yang dianggap sudah tidak memadai. Tetapi masih terdapat perusahaan nakal yang mengganti auditornya sebelum batas pemberian jasa audit berakhir. Berdasarkan penelitian-penelitian

yang dilakukan sebelumnya mengenai *auditor switching* dengan variabel independen pergantian manajemen, *financial distress*, dan ukuran KAP masih terdapat perbedaan pada hasil-hasil penelitiannya. Dengan demikian, maka pertanyaan penelitian *auditor switching* adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pergantian manajemen, *financial distress*, ukuran KAP dan *auditor switching* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014?
2. Apakah pergantian manajemen, *financial distress*, dan ukuran KAP berpengaruh secara simultan terhadap *auditor switching* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014?
3. Apakah pergantian manajemen berpengaruh secara parsial terhadap terhadap *auditor switching* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014?
4. Apakah *financial distress* berpengaruh secara parsial terhadap *auditor switching* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014?
5. Apakah ukuran KAP berpengaruh secara parsial terhadap *auditor switching* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pergantian manajemen, *financial distress*, ukuran KAP dan *auditor switching* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014.
2. Untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen, *financial distress*, dan ukuran KAP secara simultan terhadap *auditor switching* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014.
3. Untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen secara parsial terhadap *auditor switching* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014.

4. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* secara parsial terhadap *auditor switching* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014.
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP secara parsial terhadap *auditor switching* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1.6.1. Aspek Teoritis

1. Untuk bidang akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu dan pengembangan ilmu akuntansi khususnya kajian tentang audit.
2. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.6.2. Aspek Praktis

1. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi untuk profesi akuntan publik mengenai praktik *auditor switching* yang dilakukan suatu perusahaan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penulis pemahaman teoritis yang lebih mendalam tentang pengaruh *auditor switching* pada perusahaan perbankan.

1.7. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam ruang lingkup penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup hanya pada:

1. Objek dalam penelitian ini yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Periode penelitian yang dilakukan pada perusahaan perbankan yaitu tahun 2010 sampai dengan 2014.
3. Variabel dependen yang digunakan yaitu *auditor switching*. Dan variabel independen yang digunakan yaitu pergantian manajemen, *financial distress*, dan ukuran KAP.

1.8. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir ini terbagi dalam 5 bab, ringkasannya dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi dari bab ini meliputi gambaran umum objek penelitian yang berisi paparan profil objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengemukakan penelitian dalam peta keilmuan yang menjadi perhatian peneliti, perumusan masalah merupakan gambaran yang jelas dari isu yang ingin dijelaskan, pertanyaan penelitian merupakan bentuk penajaman dari perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang terkait dengan penelitian dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian, meliputi uraian tentang karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan beserta pembahasan dan penjelasan mengenai penelitian tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan penelitian ini dan saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.

(halaman ini sengaja dikosongkan)